



Tafsir Al-Qur'an dan Kekuasaan: Membaca Pandangan Bakri Syahid tentang Nasionalisme dalam Tafsir Al-Huda

Izatul Muhidah Maulidiyah^{1*} & Hikmawati Sultani²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

²Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Indonesia

*Corresponding author: izamaulidiyah23@gmail.com

Abstract

This study aims to examine how Bakri Syahid's Tafsir Al-Huda constructs notions of nationalism and legitimizes political authority through its interpretation of Q. al-Tawbah [9]:122 and its interrelation with Q. al-Nisā' [4]:59, situated within the socio-political context of Indonesia's New Order and Javanese cultural milieu. Employing a qualitative, descriptive-analytical methodology, the research integrates content analysis with a sociology of exegesis. The primary object of analysis is the Tafsir Al-Huda text itself, while the formal object concerns the construction of religious nationalism. Primary data are obtained through close textual reading, complemented by secondary sources encompassing studies on Indonesian exegesis, the intersection of religion and politics, and relevant cultural materials. The analytical process involves data reduction, thematic categorization, and historical-contextual interpretation. The findings reveal three principal insights. First, the interpretation of jihad in Q. 9:122 is reoriented toward an ethos of civic engagement and development, metaphorically likened to state "departments," thereby positioning the exegesis as a form of policy discourse. Second, the concept of "ulū al-amr" in Q. 4:59 is construed as faithful leadership that ensures welfare defined as a just and prosperous social order and commands obedience insofar as it serves the public interest, drawing upon modern exegetical sources and Javanese ethical traditions for legitimation. Third, the diverse range of sources including tafsir, fiqh, social sciences, and cultural texts constitutes an intertextual framework that reinforces the alignment of religion and state under the New Order regime. This study concludes that Tafsir Al-Huda functions as an ideological exegesis that interweaves religion, culture, and statecraft, illustrating how exegesis serves as a medium for shaping religious nationalism.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Tafsir Al-Huda karya Bakri Syahid membingkai nasionalisme dan legitimasi kekuasaan melalui penafsiran Q.S. At-Taubah [9]:122 serta keterkaitannya dengan Q.S. An-Nisa' [4]:59, dalam konteks Orde Baru dan budaya Jawa. Metode yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif-analitis dengan analisis isi dan sosiologi tafsir; objek materialnya ialah kitab Tafsir Al-Huda, sedangkan objek formalnya konstruksi nasionalisme religius. Data primer berasal dari telaah naskah, dan data sekunder meliputi kajian tafsir Indonesia, politik agama, serta sumber budaya; analisis dilakukan melalui reduksi, kategorisasi tema, dan interpretasi historis-kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. *Pertama*, penafsiran jihad pada Q.S. At-Taubah [9]:122 digeser menjadi etos partisipasi kewargaan dan pembangunan, dengan analogi departemen-departemen negara, sehingga tafsir berfungsi sebagai wacana kebijakan. *Kedua*, konsep ulū al-amr pada Q.S. An-Nisa' [4]:59 diartikulasikan sebagai kepemimpinan beriman yang menyejahterakan (adil-makmur) dan menuntut kepatuhan selama berbasis kemaslahatan, seraya menyerap rujukan tafsir modern dan warisan Jawa sebagai legitimasi etis. *Ketiga*, ragam sumber rujukan tafsir, fikih, ilmu sosial, dan naskah budaya membentuk bangunan interteks yang meneguhkan sinkronisasi agama-negara pada masa Orde Baru. Penelitian ini menegaskan bahwa Tafsir Al-Huda bekerja sebagai tafsir ideologis yang merajut agama, budaya, dan negara, sekaligus memperlihatkan bagaimana tafsir menjadi medium pembentukan nasionalisme religius.

Keywords:

Tafsir Al-Huda, Bakri Syahid, nationalism, political power, and contextual interpretation

Kata kunci:

Tafsir al-Huda, Bakri Syahid, nasionalisme, kekuasaan politik, tafsir kontekstual

Article History:

Received: 16-03-2024 | Revised: 08-05-2024, 04-06-2024 | Accepted: 07-06-2024



Pendahuluan

Hubungan antara tafsir Al-Qur'an dan kekuasaan politik di Indonesia merupakan isu penting yang mencerminkan interaksi antara agama dan negara dalam wacana keislaman modern¹. Tafsir bukan hanya teks keagamaan, melainkan juga produk sosial yang mencerminkan ideologi dan kepentingan pada masa tertentu². Salah satu contoh menonjol adalah Tafsir Al-Huda karya Bakri Syahid, yang ditulis di tengah rezim Orde Baru. Tafsir ini menunjukkan bagaimana Al-Qur'an ditafsirkan untuk memperkuat narasi nasionalisme dan legitimasi kekuasaan. Dalam karyanya, Bakri menafsirkan Q.S. At-Taubah [9]:122 sebagai dorongan bagi umat Islam untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa, bukan sekadar menuntut ilmu agama³. Konsep jihad dalam tafsirnya dipahami sebagai semangat bela negara dan partisipasi dalam kemajuan nasional⁴. Hal ini memperlihatkan bahwa tafsir dapat berfungsi sebagai wahana ideologisasi yang menautkan antara spiritualitas dan nasionalisme⁵. Isu ini menjadi krusial karena menegaskan bahwa tafsir tidak berada di ruang netral, melainkan selalu berhubungan dengan kekuasaan dan ideologi sosial-politik.

Penulisan Tafsir Al-Huda tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan politik Jawa serta suasana ideologis masa Orde Baru⁶. Bakri Syahid menggunakan bahasa Jawa krama dalam penafsirannya, sebuah pilihan yang menegaskan akar budaya sekaligus strategi komunikasi yang menjangkau masyarakat lokal. Bahasa ini mengandung nilai harmoni, sopan santun, dan penghormatan terhadap hierarki sosial yang selaras dengan struktur kekuasaan politik saat itu. Penafsiran Bakri yang menekankan nilai ketertiban dan kepatuhan pada otoritas negara mencerminkan pola pikir Jawa tradisional yang berorientasi pada rukun dan stabilitas sosial. Dalam perspektif sosiologi tafsir, hal ini memperlihatkan bagaimana kebudayaan lokal mempengaruhi pembacaan terhadap teks Al-Qur'an. Oleh karena itu, Tafsir Al-Huda tidak hanya merepresentasikan aspek teologis, tetapi juga menjadi cermin ideologis dan budaya dari masyarakat yang melahirkannya.

Kajian terhadap Tafsir Al-Huda sejauh ini masih terbatas pada aspek linguistik dan lokalitas budaya⁷, tanpa menelaah secara mendalam relasi tafsir dengan kekuasaan negara. Penelitian oleh Mubasirun⁸ menyoroti perbandingan antara Tafsir Al-Huda dan Al-Ibriz karya Bisri Musthofa, dan menyimpulkan bahwa keduanya dipengaruhi konteks sosial masing-masing. Namun, dimensi

¹ Islah Gusmian, *Tafsir Al-Qur'an & Kekuasaan di Indonesia: Peneguhan, Kontestasi, dan Pertarungan Wacana* (Yayasan Salwa Yogyakarta, 2019).

² Johanna Pink, *Qur'an Translation in Indonesia: Scriptural Politics in a Multilingual State*, 1st edn (Routledge, 2023), <https://doi.org/10.4324/9781003395287>.

³ Abuddin Nata, *Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an* (Prenadamedia Group, 2016).

⁴ Himy Bakar Almascaty, *Panduan Jihad Untuk Aktivis Gerakan Islam* (Gema Insani Press, 2001).

⁵ Mohamad Irham Maulana, 'Nasionalisme Dalam Perspektif Bakri Syahid (Kajian Ayat-Ayat Nasionalisme Dalam Al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi)' (skripsi, Fakultas Ushuluddin, 2020), <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/378/>.

⁶ Eni Zulaiha et al., 'Pengaruh Sosial Politik Pada Metodologi Penafsiran di Indonesia (Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi)', *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 5, no. 1 (2022): 25–34, <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v5i1.15538>.

⁷ S. Supriyanto, 'Harmoni Islam Dan Budaya Jawa Dalam Tafsir Kitab Suci Al-Qur'an Basa Jawi', *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 3, no. 1 (2018): 17–32, <https://doi.org/10.15575/jw.v3i1.2578>.

⁸ Mubasirun Mubasirun, 'Values of Tepo Seliro in Bakri Syahid's Tafsir al-Huda and Bisri Musthofa's Tafsir al-Ibriz', *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11, no. 2 (2021): 351–76, <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.351376>.

ideologis dan politis dari tafsir Bakri belum banyak diulas. Demikian pula, Irham Maulana⁹ meneliti gagasan nasionalisme Bakri Syahid dalam tafsir, tetapi tidak menjadikan Q.S. At-Taubah [9]:122 sebagai fokus utama, padahal ayat ini menjadi dasar pembentukan konsep jihad kebangsaan dalam tafsir tersebut. Padahal, seperti dicatat oleh Indal Abror¹⁰, sangat sedikit mufassir Indonesia yang mencoba mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan struktur kenegaraan secara eksplisit. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk membaca Tafsir Al-Huda sebagai produk ideologis yang merefleksikan strategi dakwah dan legitimasi politik rezim Orde Baru.¹¹

Penelitian ini didasarkan pada argumen bahwa Tafsir Al-Huda merupakan tafsir ideologis yang berfungsi memperkuat nasionalisme religius dan legitimasi kekuasaan Orde Baru. Bakri Syahid tidak menafsirkan ayat secara bebas nilai, tetapi dalam kerangka ideologis negara yang mengedepankan stabilitas dan pembangunan. Dengan menafsirkan jihad sebagai dedikasi terhadap bangsa dan ilmu sebagai basis kemajuan nasional, Bakri mengartikulasikan harmoni antara Islam dan Pancasila. Pendekatan ini sejalan dengan teori sosiologi tafsir, yang memandang tafsir sebagai hasil interaksi antara teks, konteks, dan posisi sosial penafsir. Melalui kerangka ini, Tafsir Al-Huda dapat dibaca sebagai teks yang mengandung political theology khas Indonesia: agama dipakai bukan hanya untuk pembinaan moral, tetapi juga untuk membentuk loyalitas terhadap negara. Pendekatan ini juga memperluas pemahaman terhadap tafsir lokal sebagai bagian dari politik wacana keagamaan di Asia Tenggara.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data deskriptif-analitis untuk memahami relasi antara tafsir Al-Qur'an, kekuasaan, dan nasionalisme sebagaimana tercermin dalam Tafsir Al-Huda karya Bakri Syahid. Metode ini dipilih karena menekankan pemahaman terhadap fenomena dari sudut pandang pelaku (emic perspective), yakni melihat cara mufassir mengonstruksi makna ayat dalam konteks sosial-politik yang mengitarinya. Penelitian ini bersifat eksploratif dengan fokus pada teks tafsir sebagai artefak budaya dan ideologis. Objek material penelitian ini adalah teks Tafsir Al-Huda (khusus pada penafsiran Q.S. At-Taubah [9]:122), sementara objek formalnya adalah konstruksi nasionalisme dalam tafsir tersebut. Data primer diperoleh melalui telaah langsung terhadap naskah tafsir, sedangkan data sekunder mencakup karya ilmiah, artikel jurnal, dan literatur terkait tafsir Indonesia pada masa Orde Baru. Analisis data dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) dan pendekatan sosiologi tafsir, meliputi proses reduksi data, kategorisasi tema, dan interpretasi makna berdasarkan konteks historis. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti menyingkap hubungan dialektis antara teks, konteks, dan ideologi yang membentuk corak tafsir Bakri Syahid.

Kajian ini berkontribusi dalam dua hal utama. *Pertama*, memperluas pemahaman tentang bagaimana tafsir Al-Qur'an digunakan sebagai alat ideologisasi politik di Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru. *Kedua*, menegaskan pentingnya membaca tafsir sebagai produk sosial yang merefleksikan hubungan kompleks antara teks keagamaan, budaya lokal, dan kekuasaan. Melalui analisis terhadap Tafsir Al-Huda, artikel ini memperlihatkan bahwa nasionalisme religius bukan sekadar hasil wacana politik, tetapi juga konstruksi tafsir yang meneguhkan legitimasi negara.

⁹ Maulana, 'Nasionalisme Dalam Perspektif Bakri Syahid (Kajian Ayat-Ayat Nasionalisme Dalam Al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi)'.

¹⁰ Indal Abror, 'Potret Kronologis Tafsir Indonesia', *Essensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 3, no. 2 (2002): 189–200.

¹¹ Nurul Huda Maarif, 'Penafsiran Politik Kolonel Bakri Syahid Dalam "Al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi"', *Islam Nusantara: Journal for the Study of Islamic History and Culture* 2, no. 2 (2021): 69–91, <https://doi.org/10.47776/islamnusantara.v3i1.64>.

Berdasarkan hal itu, tafsir menjadi ruang di mana nilai-nilai keagamaan dan kenegaraan dipertemukan dalam satu narasi ideologis. Studi ini diharapkan dapat membuka arah baru dalam kajian tafsir Indonesia dari sekadar analisis linguistik menuju pembacaan kritis terhadap relasi tafsir dan kekuasaan.

Pembahasan

Nasionalisme dan Konteks Negara Indonesia Masa Rezim Orde Baru

Nasionalisme dalam konteks Indonesia berangkat dari gagasan *nation* yang secara etimologis berakar pada makna “kelahiran¹²,” lalu dipakai untuk menandai rasa kebersamaan sebagai satu bangsa. Dalam sejarah pergerakan, istilah ini berfungsi sebagai bahasa emosi dan politik yang menyatukan beragam golongan menghadapi dominasi kolonial¹³. Pada masa penjajahan, nasionalisme menjadi “kata pemantik” yang menggerakkan organisasi pergerakan, memupuk solidaritas antarkelompok, dan menjustifikasi pengorbanan demi kemerdekaan. Slogan, pamflet, dan pidato pergerakan menghubungkan cinta tanah air dengan kewajiban mengusir penindasan. Warisan itu sekaligus menyisakan penyempitan makna setelah kemerdekaan: bila nasionalisme disepadankan semata dengan perlawanan terhadap penjajah, maka relevansinya mudah merosot di hadapan generasi yang lahir dalam negara merdeka, karena musuh eksternal yang dulu menyatukan telah tiada, sementara kebutuhan berbangsa justru menuntut horizon makna yang lebih luas daripada pola “melawan” semata.

Sesudah proklamasi, definisi nasionalisme yang identik dengan perang kemerdekaan tidak lagi memadai untuk menopang kehidupan berbangsa sehari-hari. Tanpa ancaman kolonial, energi kebangsaan perlu diarahkan pada penguatan institusi, etika kewargaan, dan pengelolaan keragaman. Karena itu, ilmuwan dan pemikir kebangsaan mengembangkan tafsir baru yang menekankan kesetaraan antarkelompok, pengakuan etnis dan budaya yang plural, rasa bangga kolektif, serta partisipasi warga. Penekanan turut bergeser ke identitas konkret: negara modern dengan pemerintahan demokratis, *rule of law*, jaminan hak asasi manusia, dan mekanisme musyawarah untuk menyelesaikan perbedaan. Dengan perluasan tersebut, nasionalisme pascakemerdekaan tidak lagi berpusat pada heroisme militer, melainkan pada komitmen bersama membangun tata kehidupan yang adil, inklusif, dan beradab, sehingga rasa cinta tanah air diwujudkan melalui perawatan institusi publik, penghormatan hak, dan kolaborasi lintas identitas dalam ruang negara-bangsa.¹⁴

Pada era Orde Baru, negara menginstitusikan visi nasionalisme melalui peneguhan landasan konstitusional dan orientasi pembangunan. Rezim memusatkan rujukan pada UUD 1945, menempatkan Pancasila sebagai falsafah dasar, serta menjadikan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi sebagai poros kebijakan¹⁵. Implementasinya tampak pada program pembangunan yang terencana, birokrasi terpusat, penyeragaman nilai melalui penataran P4, serta

¹² Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPS, ‘Nasionalisme (Bahan Ajar Latsar Gol III Angkata Ke-37)’, in *Nasionalisme* (2019).

¹³ Anggraeni Kusumawardani and Buletin Psikologi, ‘Nasionalisme’, *Archives de Médecine Sociale* 7, no. 1 (1951): 38–48.

¹⁴ Danar Widiyanta and Miftahuddin Miftahuddin, ‘Nasionalisme Indonesia Dalam Perubahan Masa Reformasi Dan Tantangan Globalisasi’, *MOZAIK Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 14, no. 2 (2023): 196–208, <https://doi.org/10.21831/mozaiik.v14i2.65836>.

¹⁵ Howard M Fedespiel, *Kajian Al-Qur’an Di Indonesia Dari Mahmud Yuns Hingga Quraish Shihab* (Mizan: Khazanah Ilmu-ilmu Islam, 1996).

prioritas integrasi nasional di atas perbedaan. Narasi kemajuan ekonomi dipadukan dengan tuntutan ketertiban sosial untuk memelihara legitimasi. Konfigurasi ini membentuk corak nasionalisme negara yang menekankan disiplin kolektif, modernisasi, dan integrasi teritorial. Dalam kerangka tersebut, loyalitas warga dinilai melalui partisipasi pada agenda pembangunan dan kepatuhan pada pilar ideologis yang ditetapkan, sehingga nasionalisme berfungsi sebagai bahasa yang merangkum tujuan ekonomi-politik sekaligus menjaga konsensus minimal di tengah keragaman sosial.

Relasi agama dan negara pada masa Orde Baru dirancang untuk menopang proyek nasionalisme dan kebijakan rezim. Sejak awal kemerdekaan telah ada Departemen Agama yang melayani semua agama; Orde Baru memperkuat arsitektur ini demi sinkronisasi wacana keagamaan dengan orientasi negara. Pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi kanal konsultasi, produksi fatwa, dan koordinasi aktivitas keislaman, yang oleh banyak kalangan dipahami sebagai mekanisme kontrol agar ekspresi dan penafsiran agama berjalan seiring dengan ideologi negara serta agenda pembangunan¹⁶. Dengan pelibatan kelembagaan tersebut, agama berperan tidak hanya sebagai sumber moral warga, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi kebijakan. Maka, pada periode ini, nasionalisme dan keagamaan saling menguatkan dalam praktik kekuasaan: yang satu menyediakan kerangka persatuan dan pembangunan, yang lain memberi bahasa etik dan otoritas simbolik untuk merawat dukungan sosial.

Konteks Sosial dan Intelektual Bakri Syahid

Brigadir Jenderal Drs. H. Bakri Syahid dengan sapaan akrab Bakri Syahid lahir di kp. Suronatan, Ngampilan, Yogyakarta pada 16 Desember 1918, bertepatan dengan hari pasaran senin wage¹⁷ memiliki nama asli Bakri.¹⁸ Nama yang menyertainya “Syahid” merupakan nama ayah-nya, Muhammad Syahid berasal dari Kotagede, Yogyakarta. Bakri lahir dari rahim ibu yang bernama Dzakhirah berasal dari Ngampilan, yang kemudian menjadi tanah di mana ia dibesarkan.¹⁹ Bakri dibesarkan pada lingkungan keluarga yang agamis berasal dari kalangan Muhammadiyah. Melalui organisasi inilah Bakri mengasah intelektual dan jenjang karirnya.

Bakri mengenyam pendidikan formalnya bermula Madrasah Muallimin yang dulu bernama *Kweekschool Islam Muhammadiyah* hingga pada tahun 1935. Lantas ia mendapatkan amanat dari organisasi untuk ikut serta berdakwah sebagai bentuk pengabdianya ke Bengkulu bersama kakak iparnya hingga pada tahun 1942.²⁰ Dengan pengalaman pengajarannya, ia melanjutkan menjadi Kepala Pusat Rawatan Rohani (Pusroh) Angkatan Darat di Jakarta, masa ini sebagai gerbang awal Bakri masuk pada wilayah militer. Beberapa tahun kemudian, ia melanjutkan pendidikan keislamannya ke IAIN Sunan Kalijaga pada 1957 di fakultas Syariah dan mengakhirinya pada tahun 1963. Karir militer ia mulai bangun sejak 1964, dimana pada tahun tersebut ia diminta Jenderal Ahmad Yani untuk studi bidang militer dengan mengirimnya ke Fort Hamilton, New York, Amerika Serikat.²¹

¹⁶ Ramdhan Muhaimin and J. M. Muslimin, 'The Role of the Council of Indonesian Ulama (MUI) to the Development of a Madani Society in the Democratic Landscape of Indonesia', *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 14, no. 2 (2023): 225, <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v14i2.3368>.

¹⁷ Gabungan Hari secara nasional dengan hitungan hari jawa yang mencakup; Legi, pon, Pahing, Wage, dan kliwon.

¹⁸ Penerbit, 'Cacala Saking Penerbit', in *Tafsir A-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi* (1977).

¹⁹ Imam Muchsin, *Tafsir Al-Qur'an Dan Budaya Lokal: Studi Nilai-Nilai Budaya Jawa Dalam Tafsir al-Huda Karya Bakri Syahid* (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010).

²⁰ Penerbit, 'Cacala Saking Penerbit', 09.

²¹ Penerbit, 'Cacala Saking Penerbit', "Cacala Saking Penerbit."; 09.

Karir pendidikan dan kemiliteran ia dapatkan secara melesat. Karir pendidikan mampu ia tunjukkan dengan menjadi pimpinan dua perguruan tinggi yang berbeda, IAIN Sunan Kalijaga (1972-1976) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai rektor pertama yang sejak 1981 diperjuangkan Bersama rekan-rekannya.²² Proses pengangkatannya sebagai rektor mendapat ragam respon, diantaranya respon mahasiswa yang sebagian menolak adanya rektor dari kalangan militer. Walaupun demikian proses pengangkatan tetap dijalankan, yang mulanya dijadwalkan pada 15 Juli 1972 diundur menjadi 10 Agustus 1972. Sedangkan jabatan rektor pertama UMY ia dapatkan saat bekerja sama Bersama kawannya; Mawardi dan Dasron untuk merintis mendirikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Keberhasilan dalam militer karir militernya ditunjukkan dengan amanat yang diembannya, diantaranya sebagai Wartawan Perang No. 6-MBT, Komandan Kompi, Kepala Pendidikan Pusroh Islam Angkatan Darat, Kepala Staf Batalyon STM-Yogyakarta, Staf Sekretaris Negara RI, Wakil Kepala Pusroh Islam Angkatan Darat, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Dari fraksi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Ia tergabung sebagai anggota MPR RI tepat saat karyanya, tafsir al-Huda pertama kali terbit (1977).²³ Walaupun baru diterbitkan, namun karyanya telah ada sejak 1972.²⁴ Bidang militer, kebangsaan yang digelutinya bukan menjadi penghalang ia untuk selalu berkarya, justru dengan ragam aktivitasnya ia memanfaatkan segala pengetahuan ditorehkannya menjadi tulisan. Demikian dibuktikan dengan ragam karya yang ia hasilkan. Adapun karya-karya yang dimaksud adalah; (1) Tata Negara RI, (2) Ilmu Jiwa Sosial, (3) Kitab Fikih, (4) Kitab Aqid, (5) Ilmu Kewiraa, (Pertahana dan Keamanan Nasional, (6) Pertahanan dan Keamanan Nasional, (7) Ideologi Negara Pancasila Indonesia (8) Al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi; yang dikaji pada artikel ini.

Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsir Al-Huda

Keberadaan tafsir al-Huda beriringan dengan adanya Al-Qur'an dan Tafsirnya dari pemerintah yang terbit pada 1975 sebagai bentuk proyek persiapan pembangunan lima tahun negara yang ada pada bidang agama.²⁵ Syahid mulai menulis pada tahun 1970 dan selesai pada 1977. Johanna Pink menyebut bahwa tafsir al-Huda menggunakan Al-Qur'an dan terjemahnya sebagai basis atau acuan penyusunannya,²⁶ walaupun secara eksistensi tafsir al-Huda dianggap sebagai tafsir pertama yang disusun dengan penyalinan ayat al-Qur'an dalam bentuk latin di Jawa.²⁷ Dengan keberadaan yang beriringan tersebut terdapat kemungkinan adanya korelasi antara tafsir al-Huda dengan al-Qur'an dan Tafsirnya. Walaupun secara langsung tidak disebutkan sebagai proyek, namun tujuan adanya tafsir al-Huda merupakan sebagai bentuk pembangunan kesadaran masyarakat untuk memahami kitab agama. Bakri Syahid menyebut pada bagian "Purwaka" bahwa penulisan tafsir al-Huda dalam Bahasa Jawa merupakan wujud dari kesadaran yang ia rasakan dan keprihatinannya terhadap tidak adanya tafsir yang ditulis dalam Bahasa Jawa dengan huruf latin,²⁸ Padahal al-Qur'an

²² Muchsin, *Tafsir Al-Qur'an Dan Budaya Lokal: Studi Nilai-Nilai Budaya Jawa Dalam Tafsir al-Huda Karya Bakri Syahid*.

²³ Penerbit, 'Cacala Saking Penerbit'.

²⁴ Departemen Agama RI, *Mukadimah Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Yayasan Dana Bakti Wakaf UII, 1991). dalam Indal Abror, 'Potret Kronologis Tafsir Indonesia', *Essensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 3, no. 2 (2002): 189-200.

²⁵ Abror, 'Potret Kronologis Tafsir Indonesia', 2002.

²⁶ Johanna Pink, 'Introduction', in *Qur'an Translation in Indonesia Scriptual Politics in a Multilingual State* (Routledge, 2023).

²⁷ Umayyatus Syarifah, 'Kajian Tafsir Berbahasa Jawa: Introduksi Atas Tafsir Al-Huda Karya Bakri Syahid A.', *Hermeneutik* 9, no. 2 (2015): 335-54.

²⁸ Bakri Syahid, 'Purwaka', in *Tafsir A-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi* (PT. Bagus Arafah, 1977).

sebagai kitab suci agama Islam seharusnya menjadi rujukan muslim dalam menjalani kehidupan. Bagi orang Jawa yang terbiasa dengan tulisan latin untuk membaca tulisan dan memahaminya, tentunya membutuhkan hal demikian.

Keprihatinannya tersebut terdorong oleh beberapa kalangan yang ia jumpai pada saat sarasehan bersama sejawatnya di Mekkah, yang berada di kediaman Syekh Abdul Manan. Pada saat demikian ia bertemu juga dengan jamaah haji berasal dari suku Jawa dan merantau di berbagai mancanegara, seperti Suriname, Singapura, Muangthai, dan Filipina. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa mereka butuh adanya Tafsir dengan menggunakan Bahasa Jawa dan ditulis dengan huruf latin.²⁹ Keberadaan Tafsir Bahasa Jawa dengan tulisan latin diharapkan mampu dipahami muslim Jawa. Pemahaman Al-Qur'an menurut Bakri mampu dilakukan dengan berbagai pendekatan. Pendekatan yang digunakan sebagai sarana pengungkapan makna yang terkandung.

Pendekatan sebagai sarana untuk memahami al-Qur'an mampu dilakukan dengan pengetahuan ilmu-ilmu sosial seperti ilmu jiwa (saat ini disebut dengan psikologi), ilmu etnologi, sosiologi, geografi, demografi, ekologi, pun juga dengan ilmu eksakta. Pernyataannya disusuli dengan pernyataan lain bahwa kesungguhan upaya kita dalam membangun bangsa pun wataknya (paradigma masyarakat pada suatu bangsa) itu tidak mudah, namun sebagai kewajiban yang mulia.³⁰ Pernyataan-pernyataan yang secara tertulis disertakan Bakri pada pengantar karyanya menunjukkan bahwa tujuan penulisan kitab tafsir ini yaitu ikut serta mengupayakan pembangunan negara melalui paradigma masyarakat bangsa dengan melalui teks-teks agama (ayat al-Qur'an) sebagai penguatnya atau bahkan sumber gagasannya.

Cara yang disuguhkan Bakri untuk memahami teks al-Qur'an dan tujuan yang mengitarinya termasuk pada tafsir dengan corak *adabī-ijtimā'ī*. Corak demikianpun ditemukan oleh Abdul Rahman yang menyebut bahwa terdapat tiga corak yang ada pada tafsir al-Huda; *ijtimā'ī*, *fiqhī*, dan *'ilmī*, dan corak yang pertamalah yang menjadi dominan,³¹ sehingga tafsir al-Huda masuk pada kategori tafsir dengan corak *adabī-ijtimā'ī*. Umiyatus Syarifah menyuguhkan contoh penafsiran yang dilakukan Bakri Syahid yang ersingungan erat dengan lingkungan social pada masa penulisan, dimana penafsiran lafadz munafiq pada QS. Al-Baqarah [2]; 22 sebagai orang yang sembrono, pun penafsiran yang dilakukan Bakri dalam menjelaskan ayat tentang makanan dan minuman yang diharamkan, Bakri menyebut sabu-sabu sebagai salahsatunya, demikian berkorelasi dengan pernyataan Miitsou Nakamaru bahwa Yogyakarta menjadi salahsatu konsumen terbesar sabu-sabu pada waktu tersebut.³²

Pembahasan tentang isu-isu sosial masyarakat dalam upaya penafsiran ayat al-Qur'an mampu mengantarkan tafsir al-Huda mendapatkan respon positif oleh kalangan masyarakat, demikian ditunjukkannya dengan percetakan yang dilakukan secara berulang-ulang (8 kali cetak) dengan jumlah 1000-2000 eksemplar pada masing-masing cetak. Tafsir yang dicetak disebarkan hingga manca negara tetangga, termasuk negara Suriname. Proses penyetakan tafsir ini tidak lagi dilakukan semenjak Bakri Syahid wafat, pun percetakan Bagus Arafah sudah tidak lagi beroperasi hingga saat ini.

²⁹ Bakri Syahid, *Tafsir Al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi* (PT. Bagus Arafah, 1987).

³⁰ Syahid, *Tafsir Al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi*.

³¹ Abdul Rahman Taufiq, 'Studi Metode Dan Corak Tafsir Al-Huda, Tafsir Qur'an Basa Jawi Karya Brigjend (Purn.) Drs. H. Bakri Syahid', *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta* 1, no. 1 (2017): 90.

³² Syarifah, 'Kajian Tafsir Berbahasa Jawa: Introduksi Atas Tafsir Al-Huda Karya Bakri Syahid A.'

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tafsir Al-Huda mengikuti tartīb mushāfi dan mencakup seluruh 114 surat dalam 30 juz. Untuk menuntun pembaca, setiap awal surat memuat ciri-ciri khusus, nama dan nomor urut, jumlah ayat, serta kategori makkiyah atau madaniyah. Pola penyajian tafsir Bakri Syahid selaras dengan tafsir generasi kedua: teks ayat di kolom kanan, terjemah Bahasa Indonesia, dan catatan kaki pada terjemah sebagai ruang penjelasan. Keunikan karya ini terletak pada penyertaan terjemah berbahasa Jawa krama (bahasa Jawa halus). Catatan kaki dimanfaatkan untuk mengurai makna, memperjelas maksud, sekaligus mengaitkan ayat dengan ayat lain atau rujukan budaya; praktik ini menghadirkan pembacaan intratekstual dan intertekstual. Penggunaan format tersebut menjadikan struktur mushafiah yang sistematis, perangkat paratekstual yang lengkap, serta jejaring interteks memperkuat fungsi tafsir sebagai panduan pemahaman tradisional dalam kerangka, namun peka pada konteks lokal dan kesinambungan makna.

Secara umum sistematis kepenulisan tafsir layaknya tafsir lain yang disusun *secara tartīb mushāfi*, namun tafsir ini sangat singkat, dikemas satu jilid yang terdiri atas 1411 halaman dengan ukuran kertas A4. Pada karya tafsir disertakan sambutan Menteri Agama RI, Surat pengesahan, purwaka (pembukaan, cacala saking penerbit (kata pengantar penerbit), kepustakaan (daftar isi), sambutan majelis ulama Derah Istimewa Yogyakarta, Komponen-komponen tersebut disertakan secara beruntun sebelum penafsiran surat al-Fātihah. Setelah penafsiran sampai surat al-Nās, disertakan doa khatam al-Qur'an. Pengetahuan tentang dasar ajaran Islam disertakan Bakri Syahid setelah do'a khatam al-Qur'an, yang terdiri atas; bab I tentang kitab suci Al-Qur'an, bab II tentang rukun Islam, bab III tentang rukun Iman, Bab IV tentang Syafaat, bab V tentang al-Birru (kebecikan); kebaikan; dn diakhiri dengan bab VI tentang hayuning bawana., dalam Bahasa Indonesia mampu dipahami sebagai bab yang menjelaskan tentang keindahan dunia,keharmonisan dunia yang mencakup tentang kedamaian.

Sumber Penafsiran

Sumber penafsiran dalam kajian kitab tafsir merupakan hal yang sangat penting untuk dicermati dan dianalisis, mengingat hal ini akan berpengaruh kepada kredibilitas kitab tafsir tersebut. Bakri Syahid menafsirkan Al-Qur'an dengan merujuk beragam literatur terdahulu. Ia tidak membatasi jenis rujukan secara kaku agar penjelasan ayat terhubung dengan khazanah keagamaan sekaligus konteks sosial-intelektual yang lebih luas. Karena itu, ia memakai sumber keagamaan dan non-agama serta mencantumkannya secara rinci pada bagian daftar rujukan; bahan-bahan tersebut kemudian dapat diklasifikasikan ke dalam tujuh kelompok utama sesuai karakter isi dan fungsinya. Strategi rujukan yang inklusif dan terdokumentasi ini memperkaya argumentasi tafsir, menjaga transparansi sumber, serta menunjukkan bahwa pembacaan Al-Qur'an bekerja melalui dialog antarteks yang luas tanpa kehilangan akurasi klasifikasi bahan acuan, bagi peneliti dan pembaca selanjutnya keilmuan.

Tabel 1. Analisis Sumber Penafsiran Kitab Tafsir Al-Huda

No	Bidang Kajian	Kitab/Buku Rujukan	Keterangan
I	Kitab Tafsir	al-Muṣḥaf al-Muyassar – Abdul Jalil 'Īsā; Fi Zilāl al-Qur'ān – Sayyid Quṭb; Tafsīr al-Marāghī – Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī; Tafsīr al-Manār – Muḥammad Rashīd Riḍā; Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm – Ibn	Kitab tafsir utama yang menjadi rujukan tekstual

		Kathīr; An-Nūr: Tafsir al-Qur’ān al-Majīd – T. M. Hasbi Ash-Shiddiqy; Tafsir al-Furqān – Ahmad Hassan; The Holy Qur’an – A. Yusuf Ali	
2	‘Ulūm al-Qur’ān & pendampingnya	Hikmah Qoeraniyah – Ki Bagoes H. Hadikoesomo; Catetan Pribadi Kuliyyah Tafsir Qurān – (bersama) Prof. Dr. H. Mukhtar Yahya	Sumber metodologis/pendidikan tafsir
3	Pemerintahan & Ideologi Negara	Kata Terpilih dari Departemen Penerangan – Presiden Soeharto; Mengamankan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa (Symposium IAIN Syarif Hidayatullah, 1970); Ideologi Negara Pancasila – Drs. H. Bakri Syahid; Dharma 45 – Departemen Pertahanan Keamanan RI	Menunjukkan sinkronisasi tafsir dengan agenda negara/pembangunan
4	Literatur tentang Perwira/Keperwiraan	Ilmu Kewiraan – Kolonel Drs. H. Bakri Syahid	Penopang etos bela negara/ketertiban
5	Budaya Jawa	Kawi-Jawa & Baoesastra Indonesia-Djawi – W. J. S. Poerwadarminta; Kepercayaan Masyarakat Jawa – Drs. Romelon; Kapoestakakan Djawa – Prof. Dr. R. M. Ng.; Pantheisme en Monisme – P. J. Zoetmulder, S.J.; De Heiligen van Java – Rinkes; Kidoengan Kanjeng Susuhunan Kalidjaga; Serat Wedhatama – K.G.P.A.A. Mangkunegara IV; Serat Wulangreh – Kanjeng Susuhunan Pakubuwono	Basis interteks budaya lokal (bahasa/etika/kepercayaan)
6	Fikih & Ibadah	Tuntunan Shalat – Majelis Tabligh Muhammadiyah (1943); Himpunan Do’a-Do’a – Pusroh Islam AD (1967); Manasik Haji dan Do’a Ziarah – Ditjen Urusan Haji (1970); Kitab Iman dan Sembahyang – Majelis Tarjih PP Muhammadiyah (1929); Kitab Falak dan Hisab – K. R. Muhammad Wardan; Fiqh al-Da’wah – M. Natsir; Tuntunan Iman dan Islam – Prof. K.H.R. Muhammad A.	Rujukan praktis-normatif (ibadah, hisab, dakwah)
7	Ilmu Sosial/“Social-Science”	Mengenal Pokok-pokok Antropologi dan Kebudayaan – Drs. Mahjunir; Islamic Way of Life – Sayyid Abul A’la Maududi; Panel Diskusi Pimpinan Pusat Muhammadiyah (1977); Encyclopedia of Social Science; Poerbotjaroko & Tardjan Hadidjaja; Pengantar Antropologi – Prof. Harsojo; Sejarah dan Kebudayaan Islam – Prof. Dr. A. Syalabi; Islam: Integrasi Ilmu dan Kebudayaan – Drs. Sidi Gazalba	Kerangka analisis sosial-historis dan peradaban

Berdasarkan tabel di atas, terlihat dalam tafsir Al-Huda spektrum rujukan menunjukkan bangunan tafsir yang berlapis: fondasinya adalah korpus tafsir klasik-modern (Ibn Kathīr, al-Manār, al-Marāghī, Quṭb, Hasbi, Hassan, Yusuf Ali) sebagai sumber tekstual utama; lapisan metodologis (‘ulūm al-Qur’ān dan catatan kuliah) memberi perangkat membaca dan menimbang makna. Di atasnya, rujukan pemerintahan dan ideologi negara (Soeharto, Pancasila, Dharma 45) menandai

sinkronisasi tafsir dengan agenda pembangunan serta etos ketertiban yang ditegaskan lagi oleh literatur kewiraan. Sementara itu, paket budaya Jawa (Poerwadarminta, Zoetmulder, Serat, tradisi wali) menyediakan kamus nilai lokal bahasa, etika, dan keyakinan yang membuka ruang interteks. Kluster fikih-ibadah menghadirkan landasan normatif-praktis (shalat, haji, hisab, dakwah), sedangkan rumpun ilmu sosial memberi kerangka analitis untuk membaca masyarakat, sejarah, dan peradaban. Kombinasi ini menghasilkan tafsir yang bukan hanya filologis, tetapi juga sosiologis dan politis: teks dibaca secara kontekstual, bernuansa lokal, dan terarah pada pembinaan warga serta legitimasi agenda kebangsaan.

Sebagaimana hasil penelitian Nurul Huda Ma'arif menyebut bahwa terdapat Ayat-ayat dengan karakter longgar ditarik paksa oleh penyusun untuk mendukung suatu gagasan di mana ia setuju dan ikut serta memperjuangkannya. Seperti dukungan untuk rezim penguasa tanpa memperhatikan konteks budaya di mana ayat tersebut diturunkan.³³ Keadaan demikian tentunya sesuai dengan latar belakang dia yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Pun tahun 1977 yang ia nyatakan sebagai tahun penyelesaian tafsir tersebut merupakan masa rezim Orde Baru. Pada masa rezim Orde Baru inilah terdapat berbagai perubahan terjadi secara signifikan. Bukan hanya itu pada masa ini berbagai cara dilakukan oleh penguasa agar rakyat mau tunduk dan mengikuti arahan yang diberikan.³⁴ Upaya yang dilakukan Bakri tentunya sesuai dengan pernyataan bahwa Pesan Tuhan dalam hal ini ayat al-Qur'an akan selalu dipahami berbanding lurus dengan realitas kondisi sosial yang berjalan sesuai dengan berjalannya perkembangan zaman. Keadaan demikian juga berbanding lurus dengan pernyataan Fadhi Lukman yang mengklasifikasikan lintasan sejarah penulisan tafsir di Indonesia, dimana Tafsir al-Huda ada pada lintasan sejarah dengan konteks internal Indonesia dan lokalitas tafsir sebagai titik berat yang digunakan.³⁵

Nasionalisme dalam Tafsir Al-Huda

Nasionalisme dalam tafsir al-Huda penulis temukan secara tersirat ditulis oleh mufasssir pada penafsirannya Qs. At-Taubah: 122 yang kemudian dikorelasikan oleh mufasssir dengan Qs. An-Nisa 59. Melalui kedua ayat tersebut penulis berupaya menggali pemahaman bahwa sikap nasionalisme mampu dilakukan dengan ikut serta dalam pembangunan negara dan tertib pada kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah "*ulū al-Amr*". Lantas pada ayat kedua, mufasssir menyebut kriteria-kriteria yang seharusnya menempel pada pemerintah sebagai pemangku kekuasaan pada negara. Berikut penjelasannya.

I. Pembangunan Negara

Pembangunan negara yang disertakan oleh Bakri Syahid dijelaskan dengan dalam menafsirkan At-Taubah ayat 122 yang secara tertulis ia sertakan pada bagian catatan kaki bagian akhir terjemah ayat dalam bahasan Jawa;

Lan tumrap wong-wong Mu'min ora prayoga kabeh budhal perang, yagene ora ana sing budhal saperangan saka dheweke, perlu pada nyinau 'ilmu mangerten Agama, lan supaya dheweke banjur aweh pepeling marang kaume menawa wus padha bali menyang Kampunge. Muga-muga dheweke (kaum-kaume) padha gelem eling.

³³ Nurul Huda Maarif, 'Penafsiran Politik Kolonel Bakri Syahid Dalam "Al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi"', *ISLAM NUSANTARA: Journal for the Study of Islamic History and Culture* 2, no. 2 (2021): 69–91, <https://doi.org/10.47776/islamnusantara.v3i1.64>.

³⁴ Hadi Wahyono Dwi and Kasuma Gayung, 'Propaganda Orde Baru 1966-1980', *Verleden* 1, no. 1 (2012): 1–109.

³⁵ Fadhi Lukman, 'Telaah Historiografi Tafsir Indonesia: Analisis Makna Konseptual Terminologi Tafsir Nusantara', *Suhuf* 14, no. 1 (2021): 49–77.

Berikut tafsir yang dimaksud dalam Bahasa Indonesia;

“Dan bagi orang Mu'min tidak semua dianjurkan berangkat untuk berperang, sebagian dari kita perlu ada yang belajar ilmu Agama, agar mampu mengingatkan kepada umat ketika kembali ke kampung halaman. Semoga kita menjadi umat yang selalu ingat.”

Bakri menjelaskan ayat tersebut secara rinci, berbeda dengan ayat-ayat lain yang ia coba menggali maknanya, adapun catatan kaki yang dimaksud sebagai bentuk penafsiran yang ia berikan yaitu:

Dhawuhing Ayat punika kados sampun cetha terang, sarta tetela wonten ing 'alam Islam, bilih kabetahipun Ummat kedah dipun pilah-pilah lan dipun bage-bage panggarapipun, kados dene Departemen- Departemen manawi wonte Pamarentahan. Sadaya gatra (aspek) masyarakat kedah dipun cakup, kadostu aspek Sosial Budaya, aspek Ekonomi, aspek Politik, aspek Ideologi, aspek Keamanan-Pertahanan, lan aspek Agama. Ngrembakanipun kedah sarwa manunggal, integrase, koordinasi, sinkronisasi, sarta harmoni satunggal an sawenehipun. Panggarapiun program, lan wragad sarta ingkang kontrol nitipriksa kedah dipun musyawarahaken dening para ahli lan wakil-wakil rakyat, ingkang mangertosi kabetahaning Ummat. Dene kabetahaning Ummat punika peprincenanipun kathah anget, boten wonten anggeranipun, jalaran gumantung kaliyan ombak-umbuling kawontenan lan lampahing jaman, sarta kiproahing tehnlolgi modern. Mugi kawuningana ing para sutrisna, bilih ilmu teknologi-modern kalayan Islam boten memengsan, malah sajatosipun sami bantu-binantu, lan sami dene ngisi satunggal ing sawenehipun. Inggih kabetahanan ingkang kados makaten punika ingkang kawastanan Fardlu Kifayah (Kuwajibaning Ummat ingkag wajib katindakaken kanthi samurna, manawi dipun lirwakaken ageng sanget bebayanipun lan ageng dosanipun menggah Allah). Inggih makaten wau sampun mesthi ugi kemawon sagedipun tumindak samudayanipun, kedah dipun wonteni rerakitaning Organisasi, inggih punika Pamerintah saking pilihaning Ummat ingkang tinata sae, rajin tur beres (clean government). Awit saking punika miturut piwucaling Allah S.W.T. wonten ing Surat An-Nisa' ayat 59, babagan falsafah dhedhasaring Negara (Pamarentah), kawilujenganin Ummat, adeg lan lestantunipun kedah wonten Ulii-amri ingkang saged mranata nyakup sadaya gatra (aspek) masyarakat ummat.³⁶

Berikut tafsir yang dimaksud dalam Bahasa Indonesia.

“Perintah dari ayat ini sepertinya sudah sangat jelas, dan tampak terang dalam Islam, bahwa kebutuhan umat harus dibagi-bagi dan dibedakan tugasnya, seperti Departemen-departemen dalam pemerintahan. Semua aspek masyarakat harus dicakup, seperti aspek Sosial Budaya, aspek Ekonomi, aspek Politik, aspek Ideologi, aspek Keamanan-Pertahanan, dan aspek Agama. Pengembangannya harus menyatu, terintegrasi, terkoordinasi, tersinkronisasi, serta harmonis dalam satu kesatuan. Pengerjaan program, anggaran, serta pengawasan harus dimusyawarahkan oleh para ahli dan wakil-wakil rakyat, yang memahami kebutuhan umat. Karena kebutuhan umat itu rinciannya banyak sekali, tidak ada aturan tetap, karena tergantung pada perkembangan keadaan dan perjalanan zaman, serta kemajuan teknologi modern. Semoga para pembaca menyadari bahwa ilmu teknologi-modern dan Islam tidak bertentangan, justru sebenarnya saling membantu, dan saling mengisi dalam satu kesatuan. Kebutuhan seperti inilah yang disebut Fardlu Kifayah (Kewajiban Umat yang wajib dilaksanakan dengan sempurna, jika diabaikan sangat besar bahayanya dan dosanya di hadapan Allah). Untuk dapat melaksanakan semuanya itu, harus ada organisasi yang terstruktur, yaitu Pemerintah pilihan umat yang teratur baik, rajin dan bersih (clean government). Oleh karena itu, menurut perintah Allah S.W.T. dalam Surat An-Nisa' ayat 59, tentang dasar filosofi Negara (Pemerintah), keselamatan umat, berdiri dan lestarnya harus ada Ulii-amri yang mampu mengelola semua aspek masyarakat umat.”

³⁶ Syahid, *Tafsir Al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi*.

Ayat tersebut mengajarkan bahwa kekuatan masyarakat perlu diklasifikasikan sesuai bidang dan kemampuan. Bakri memberi contoh melalui departemen-departemen dalam sistem pemerintahan Indonesia: Sosial-Budaya, Ekonomi, Politik, Ideologi, Keamanan-Pertahanan, dan Agama. Implementasi nilai ayat dilakukan lewat musyawarah untuk bersatu, berintegritas, berkoordinasi, dan bersinkronisasi dalam persatuan. Ia menandakan bahwa praktik serupa telah berjalan pada era Orde Baru melalui penugasan menteri-menteri yang fokus pada sektor masing-masing; pada masa itu kabinet berlapis menjalankan agenda pembangunan. Gagasan klasifikasi dan koordinasi ini menempatkan masyarakat sebagai subjek yang terorganisasi, sementara negara bertugas merajut sinergi kelembagaan demi kemaslahatan publik.³⁷

Dalam penafsirannya, Bakri menyebut “wakil rakyat” untuk menegaskan bahwa program kabinet memerlukan kontrol dan musyawarah dengan perwakilan yang memahami kebutuhan masyarakat. Itu menunjukkan perhatiannya pada kesejahteraan warga melalui kebijakan yang berdampak nyata. Menurutnya, mekanisme ini efektif dalam pemerintahan hasil pemilihan langsung yang sistematis dan berintegritas (clean government). Untuk menguatkan argumen, ia kembali pada falsafah dasar negara: diperlukan pemimpin ulū al-amr yang mampu menaungi seluruh aspek kehidupan publik. Pandangan Bakri tentang mandat rakyat menegaskan dukungannya pada demokrasi substantif, bukan sekadar alih kekuasaan bersifat prosedural atau aklamatif seperti praktik pemilihan di masa lalu.³⁸

Penyusunan Tafsir Al-Huda terjadi pada masa Orde Baru ketika presiden dipilih MPR melalui Sidang Umum, bukan langsung oleh rakyat. Islah Gusmian menilai demokrasi yang dimaksud dalam tafsir ini adalah “Demokrasi Pancasila” yang sedang diusung rezim.³⁹ Gusmian merujuk penafsiran Bakri atas Qs. al-Nisā’ 83 tentang ulū al-amr di tengah maraknya kabar palsu; konteks ayat menuntut kewaspadaan, khususnya dalam urusan keamanan. Berbeda dari narasi historis sahabat, Bakri mengontekstualisasikan makna itu pada tata kelola Indonesia. Respons negara dinilai suportif; penerbitan tafsir bahkan memperoleh dukungan anggaran untuk didistribusikan kepada masyarakat tanpa pungutan.⁴⁰

Kedekatan Bakri dengan pemerintahan Orde Baru memengaruhi aksentuasi penafsirannya, termasuk pada ayat yang tengah dibahas. Menurut Gusmian, hasil bacaan Bakri menampilkan corak “tafsir gincu” dan “tafsir bungkam.”⁴¹ Contoh “bungkam” tampak pada Qs. al-Nisā’ 83; contoh lain di Qs. al-Mā’idah 32 ketika membahas kemiliteran, uraian Bakri relatif abstrak. Ia berupaya mengindonesiakan makna, tetapi tetap bergerak dalam orbit hegemoni rezim.⁴² Dengan demikian, tafsir berfungsi sekaligus sebagai wacana moral dan

³⁷ Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, ‘Kabinet Pembangunan IV’, <https://setkab.go.id/kabinet-pembangunan-vi/>.

³⁸ Diana Fauzia, *Sistem Presidensial Indonesia Dari Soekarno Ke Jokowi*, Revisi (Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerjasama dengan AIPI, 2018).

³⁹ Indarja, ‘Perkembangan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia’, *Masalah-Masalah Hukum*, no. 1 (2018): 63–70.

⁴⁰ Berikut penafsiran Bakri terhadap lafadz ulū al-Amr pada tafsir al-Huda;

Ing zaman Rasulullah s.a.w. inggih punika ara Sahabat lan para Winasis ing ilmu, zaman sapunika Ulil Amri punika Pemerintahan Cara Demokrasi, boten tebih kados tata negari ing Indonesia cara Demokrasi Pancasila naminipun. pada Syahid, *Tafsir Al-Huda: Tafsir Qur’an Basa Jawi*.

⁴¹ Islah Gusmian, *Tafsir Al-Qur’an Dan Kekuasaan Di Indonesia: Peneguhan, Kontestasi, Dan Pertarungan Wacana* (Yayasan Salwa Dewa, 2019).

⁴² Gusmian, *Tafsir Al-Qur’an Dan Kekuasaan Di Indonesia: Peneguhan, Kontestasi, Dan Pertarungan Wacana*.

instrumen penataan sosial-politik: menertibkan alur legitimasi, meneguhkan ketertiban, serta mengafirmasi hierarki otoritas di tingkat negara.

Sikap nasionalisme Bakri diwujudkan melalui seruan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Rakyat didorong mengembangkan potensi, sementara pemerintah diminta menyediakan dukungan programatik melalui departemen spesifik yang menyusun kerja sesuai mandat sektoral. Dengan pengaitan kebijakan dan kebutuhan warga secara presisi, ia membayangkan lahirnya masyarakat madani yang aktif berkontribusi pada pembangunan dari berbagai bidang. Bacaan ini berkelindan dengan rujukan tafsir (al-Marāghī, al-Manār, al-Furqān) yang menegaskan kewajiban menuntut ilmu, meski perluasan “departemen” adalah inovasi kontekstual Bakri⁴³. Hasilnya, Tafsir Al-Huda menempatkan ilmu, etika publik, dan tata negara dalam satu kerangka pembangunan kebangsaan.

2. Pemerintah dalam Suatu Negara

Penjelasan Bakri pada Qs. At-taubah ayat 122 ditutup dengan penjelasan terhadap pemegang kekuasaan -pemerintah- melalui lafadz ulū al-amr, yang mana ia menyebut akan dijelaskan pada Qs. An-Nisa ayat 59. Adapun penafsiran yang ia sertakan yaitu;

*Tiyang ingkang ngasta Pemerintahan punika wajib iman ing Allah, iman dumateng Rasulullah s.a.w. sarta nindaaken sadaya tatanan lan aturan agami Islam, manawi boten, tangeh lamun badhe saged damel adil-makmur materiil lan spiritual, karaharjan Donya lan Akherat. Bab punika cocok sanget kados ingkang kasebat ing “Wulang Reh” vasan dalem Ingkang Sinuhun Paku Buwono IV: “Lamun ana wong micareng ngelmi, tan mufakat ing patang perkara. aja sira age-age, anganggep nyatanipun, limbangen lan kang patang perkara rumuhun. Dalil, Hadits, lan Idjmak, Qiyase, papat iku salah siji, anaa kang mufakat”. Tagesipun ilmu pengetahuan utawi kawicaksanaan paprentahan punika kedah cocok, boten kenging nyimang, saking Dalil (Quraan), Hadist Rasulullah s.a.w., Idjmak lan Qiyas; Pramila kedah dipun teliti, sampun nilar angger-anggering Agama.*⁴⁴

Berikut tafsir dalam Bahasa Indonesia

“Orang yang menjalankan pemerintahan itu wajib beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah s.a.w. serta melaksanakan semua aturan dan ketentuan agama Islam. Jika tidak, sulit untuk bisa menciptakan keadilan dan kemakmuran baik materiil maupun spiritual, kesejahteraan Dunia dan Akhirat. Hal ini sangat sesuai seperti yang disebutkan dalam “Wulang Reh” karya Ingkang Sinuhun Paku Buwono IV: “Jika ada orang yang membicarakan ilmu, tetapi tidak sesuai dengan empat hal. Janganlah kamu cepat-cepat menganggapnya benar, timbanglah dengan empat hal itu terlebih dahulu. Dalil, Hadits, dan Ijmak, Qiyas, keempat hal itu salah satunya harus ada yang sesuai.” Artinya, ilmu pengetahuan atau kebijaksanaan pemerintahan itu harus cocok, tidak boleh menyimpang, dari Dalil (Al-Qur'an), Hadist Rasulullah s.a.w., Ijmak, dan Qiyas; Oleh karena itu, harus diteliti, jangan sampai meninggalkan aturan-aturan Agama.”

Penafsiran Bakri Syahid atas Qs. An-Nisa' 59 memusat pada kriteria ulū al-amr sebagai pemegang kekuasaan yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta menegakkan tata pemerintahan sesuai ajaran Islam. Dalam bacaan tekstualnya, prioritas pemimpin diberikan kepada Muslim; dalam konteks Indonesia yang majemuk, ia tetap mengedepankan Muslim untuk jabatan strategis agar cita-cita adil-makmur material dan spiritual tercapai⁴⁵. Arah ini sejalan dengan rujukannya: Sayyid Quṭb menegaskan ulū al-amr berasal dari kalangan mu'min,

⁴³ Ahmad Musthafa Al- Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971).

⁴⁴ Syahid, *Tafsir Al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi*.

⁴⁵ Syahid, *Tafsir Al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi*.

sedangkan al-Marāghī memperluas makna ulū al-amr mencakup pemerintah, ḥukamā', 'ulamā', kepala militer, para pemimpin dan zu'amā' (menteri)⁴⁶. Dasar perluasan itu ialah kebutuhan manusia dan kemaslahatan umum: keputusan kolektif wajib ditaati selama tidak menyimpang dari perintah Allah dan Rasul, dapat dipercaya, dan bebas dari paksaan. Dengan demikian, Bakri merakit posisi normatif yang menautkan iman, kepemimpinan, dan kepatuhan sebagai prasyarat legitimasi politik.

Rujukan Abdullah Yusuf Ali memperkuat aksen ketertiban: ulū al-amr ialah pihak berwenang yang memikul tanggung jawab menyelesaikan persoalan publik dengan otoritas dari Tuhan, sehingga ketaatan warga menghasilkan keteraturan sosial⁴⁷. Bacaan Bakri beresonansi dengan ini: mandat ilahi diarahkan pada tujuan kebaikan dan tata hidup adil-makmur⁴⁸. Dari al-Manār, Bakri menyerap gagasan bahwa makna ulū al-amr itu beragam menurut riwayat; kewajiban taat berlaku ketika pemegang otoritas bersepakat demi maṣlaḥah, manfaat, dan keadilan⁴⁹. Rasyīd Riḍā bahkan memberi contoh bidang konkret perdagangan, industri/pabrik, pertanian sebagai ranah keputusan yang menuntut kompetensi dan mufakat. Pola ini berkait erat dengan penafsiran Bakri atas Qs. At-Taubah 122 yang mengarahkan tafsir ke wilayah pemerintahan: pengelompokan fungsi dan "departemen-departemen" kebijakan⁵⁰. Maka, al-Manār bukan hanya menjadi sumber makna, tetapi juga memberi dorongan metodologis untuk mengartikulasikan ayat menuju desain kelembagaan modern.

Di luar literatur tafsir, Bakri memanggungkan Serat Wulangreh karya Pakubuwono IV sebagai sandaran budaya untuk menegaskan kriteria ulū al-amr: pengambil keputusan harus sejalan dengan Al-Qur'an, Hadis, Ijmā', dan Qiyās. Otoritas budaya Jawa ini berfungsi sebagai legitimasi etis bahwa kepemimpinan ideal ditopang disiplin syariat. Dari sini tampak preferensi Bakri terhadap pemerintah yang dipimpin Muslim agar kebijakan selalu berpatokan pada empat sumber hukum. Serat Wulangreh dipersepsi monumental dalam tradisi Jawa menyediakan kosakata moral yang menurut Muh Wasith banyak beririsan dengan nilai-nilai agama. Motif keterhubungan nilai inilah yang menjelaskan daya tariknya bagi Bakri: sebagai mufassir berlatar Jawa, ia akrab dengan horizon etika lokal yang telah terinternalisasi. Karena itu, ketika mengonstruksi argumen tafsir, ia dapat mengontekstualkan prinsip-prinsip nash dengan hikmah lokal, sehingga teks wahyu dan kearifan budaya bertemu dalam kerangka legitimasi kepemimpinan dan tata pemerintahan.

Simpulan

Penafsiran ayat Al-Qur'an yang dilakukan oleh Bakri Syahid terhadap sistem negara Indonesia pada masa penulisan tafsir (rezim Orde Baru), Qs. At-Taubah: 122 menjadi bukti keberpihakan kepada penguasa. Qs. At-Taubah: 122 yang selama ini dipahami oleh sebagian kalangan mufasir sebagai ayat yang mengandung makna perintah menuntut ilmu agama serta jihad digunakan Bakri Syahid dalam menasirkan ayat tersebut. Namun terdapat upaya pengembangan makna oleh Bakri

⁴⁶ Sayyid Qutb, *Tafsīr Fi Ṣilā'il Qur'ān* (n.d.).

⁴⁷ Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*.

⁴⁸ Sayyid al-Imam Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim al-Masyhur Bi Tafsir al-Manar* (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005).

⁴⁹ Ridha, *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim al-Masyhur Bi Tafsir al-Manar*.

⁵⁰ Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur'an Text, Translator, and Commentary* (n.d.).

Syahid untuk mengkontekstualisasikan terhadap keadaan Indonesia. Bahwa perlunya pembangunan negara yang mampu dilakukan jika dibentuknya departemen-departemen negara sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Urgensi keberadaan departemen sebagai bentuk optimalisasi yang mampu dilakukan negara terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) warga negara sesuai dengan konsen departemen, dimana departemen akan mengadakan program-program sesuai dengan konsennya. Adanya fokus pada aspek tertentu, tentu hasil dan dampak pada masyarakat akan cenderung lebih optimal dibandingkan dengan tidak adanya fokus.

Peneliti menyadari adanya keterbatasan penelitian yang hanya fokus terhadap pembacaan Bakri Syahid terhadap Qs. At-taubah ayat 122 yang kemudian dikorelasikannya terhadap Qs. An-Nisa ayat 59. Keterbatasan tersebut memberikan peluang untuk dilakukan penelitian-penelitian berikutnya dengan mengembangkannya atau melalui pembacaan yang berbeda atau berkaitan dengan nasionalisme, seperti pembacaan pada Qs. An-Nisa ayat 85 secara spesifik berbicara tentang ulū al-amr layaknya Qs. An-Nisa ayat 59. Atau bahkan berupaya mengkaji bagaimana aspek pluralisme yang sempat menjadi isu penting dalam berbangsa, khususnya di Indonesia. Dari pijakan tersebut tentu mampu dikembangkan dengan pendekatan-pendekatan lain sehingga terdapat hasil temuan yang dinamis.

Daftar Pustaka

- Abror, Indal. 'Potret Kronologis Tafsir Indonesia'. *Essensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 3, no. 2 (2002): 189–200.
- Ali, Abdullah Yusuf. *The Holy Qur'an Text, Translator, and Commentary*. n.d.
- Almascaty, Himy Bakar. *Panduan Jihad Untuk Aktivis Gerakan Islam*. Gema Insani Press, 2001.
- Departemen Agama RI. *Mukadimah Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. Yayasan Dana Bakti Wakaf UII, 1991.
- Fauzia, Diana. *Sistem Presidensial Indonesia Dari Soekarno Ke Jokowi*. Revisi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerjasama dengan AIPI, 2018.
- Fedespiel, Howard M. *Kajian Al-Qur'an Di Indonesia Dari Mahmud Yuns Hingga Quraish Shihab*. Mizan : Khazanah Ilmu-ilmu Islam, 1996.
- Gusmian, Islah. *Tafsir Al-Qur'an Dan Kekuasaan Di Indonesia: Peneguhan, Kontestasi, Dan Pertarungan Wacana*. Yayasan Salwa Dewa, 2019.
- Hadi Wahyono Dwi, and Kasuma Gayung. 'Propaganda Orde Baru 1966-1980'. *Verleden* 1, no. 1 (2012): 1–109.
- Indarja. 'Perkembangan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia'. *Masalah-Masalah Hukum*, no. 1 (2018): 63–70.
- Indonesia, Sekretaris Kabinet Republik. 'Kabinet Pembangunan IV'. <https://setkab.go.id/kabinet-pembangunan-vi/>.
- Kusumawardani, Anggraeni, and Buletin Psikologi. 'Nasionalisme'. *Archives de Médecine Sociale* 7, no. 1 (1951): 38–48.
- Lukman, Fadhli. 'Telaah Historiografi Tafsir Indonesia: Analisis Makna Konseptual Terminologi Tafsir Nusantara'. *Suhuf* 14, no. 1 (2021): 49–77.
- Maarif, Nurul Huda. 'Penafsiran Politik Kolonel Bakri Syahid Dalam "Al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi"'. *Islam Nusantara: Journal for the Study of Islamic History and Culture* 2, no. 2 (2021): 69–91. <https://doi.org/10.47776/islamnusantara.v3i1.64>.

- Maraghi, Ahmad Musthafa Al-. *Tafsir Al-Maraghi*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971.
- Maulana, Mohamad Irham. 'Nasionalisme Dalam Perspektif Bakri Syahid (Kajian Ayat-Ayat Nasionalisme Dalam Al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi)'. Skripsi, Fakultas Ushuluddin, 2020. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/378/>.
- Mubasirun, Mubasirun. 'Values of Tepo Seliro in Bakri Syahid's Tafsir al-Huda and Bisri Mustofa's Tafsir al-Ibriz'. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11, no. 2 (2021): 351–76. <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.351376>.
- Muchsin, Imam. *Tafsir Al-Qur'an Dan Budaya Lokal: Studi Nilai-Nilai Budaya Jawa Dalam Tafsir al-Huda Karya Bakri Syahid*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Muhaimin, Ramdhan, and J. M. Muslimin. 'The Role of the Council of Indonesian Ulama (MUI) to the Development of a Madani Society in the Democratic Landscape of Indonesia'. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 14, no. 2 (2023): 225. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v14i2.3368>.
- Nata, Abuddin. *Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Prenadamedia Group, 2016.
- Penerbit. 'Cacala Saking Penerbit'. In *Tafsir A-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi*. 1977.
- Pink, Johanna. *Qur'an Translation in Indonesia: Scriptural Politics in a Multilingual State*. 1st edn. Routledge, 2023. <https://doi.org/10.4324/9781003395287>.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPS. 'Nasionalisme (Bahan Ajar Latsar Gol III Angkata Ke-37)'. In *Nasionalisme*. 2019.
- Ridha, Sayyid al-Imam Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim al-Masyhur Bi Tafsir al-Manar*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005.
- Supriyanto, S. 'Harmoni Islam Dan Budaya Jawa Dalam Tafsir Kitab Suci Al-Qur'ânTMan Basa Jawi'. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 3, no. 1 (2018): 17–32. <https://doi.org/10.15575/jw.v3i1.2578>.
- Syahid, Bakri. 'Purwaka'. In *Tafsir A-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi*. PT. Bagus Arafah, 1977.
- Syahid, Bakri. *Tafsir Al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi*. PT. Bagus Arafah, 1987.
- Syarifah, Umaiatus. 'Kajian Tafsir Berbahasa Jawa: Introduksi Atas Tafsir Al-Huda Karya Bakri Syahid A.'. *Hermeneutik* 9, no. 2 (2015): 335–54.
- Taufiq, Abdul Rahman. 'Studi Metode Dan Corak Tafsir Al-Huda, Tafsir Qur'an Basa Jawi Karya Brigjend (Purn.) Drs. H. Bakri Syahid'. *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta* 1, no. 1 (2017): 90.
- Widiyanta, Danar, and Miftahuddin Miftahuddin. 'Nasionalisme Indonesia Dalam Perubahan Masa Reformasi Dan Tantangan Globalisasi'. *MOZAIK Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 14, no. 2 (2023): 196–208. <https://doi.org/10.21831/mozai.v14i2.65836>.
- Zulaiha, Eni, Kartini Fujiyanti Agustin, and Nida Al Rahman. 'Pengaruh Sosial Politik Pada Metodologi Penafsiran di Indonesia (Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi)'. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 5, no. 1 (2022): 25–34. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v5i1.15538>.